



TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

- Dana otonomi khusus banyak diselewengkan dan ada program fiktif.
- Penggunaan dana otonomi khusus tak didukung data valid.
- Pengadaan barang dan jasa dari dana otonomi khusus banyak yang tak sesuai dengan aturan.
- Dana otonomi khusus didepositokan.

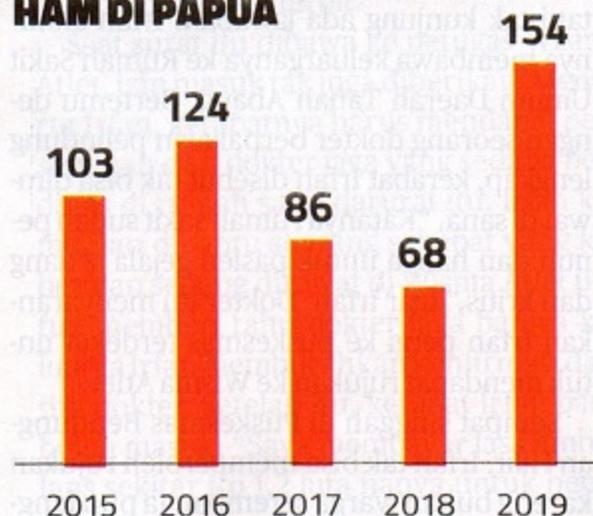
MENGAPA DANA OTONOMI KHUSUS DITUDING TAK OPTIMAL

- Angka kemiskinan masyarakat Papua dan Papua Barat tetap tinggi.
- Indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat terus berada di tingkat terendah.
- Kualitas pendidikan rendah.
- Akses dan kualitas kesehatan rendah.
- Tingkat keterampilan tenaga kerja asal Papua rendah.

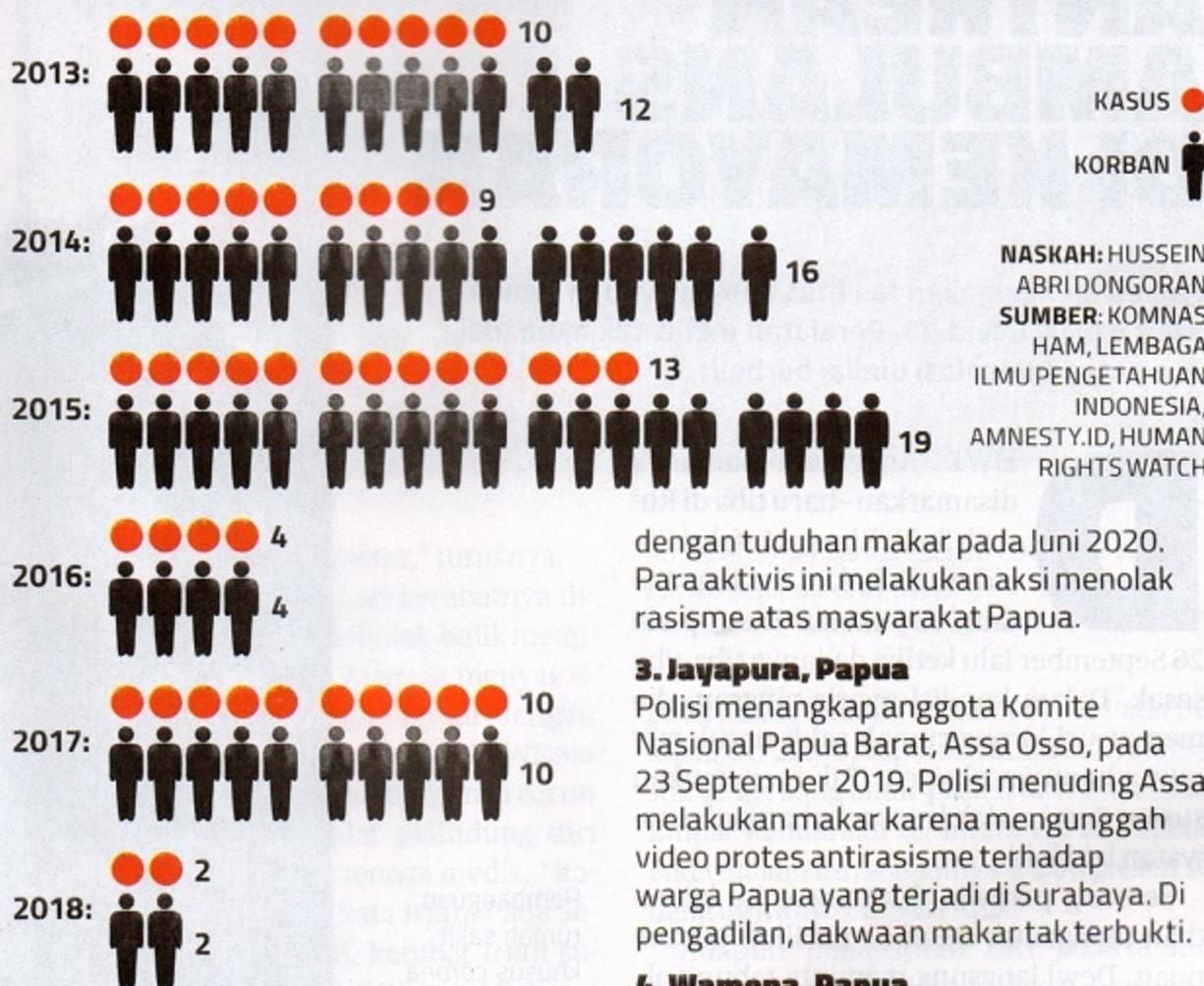
SEDERET KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

- Pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua. Lima orang tewas dengan luka tembak dan 17 orang lainnya luka-luka.
- Pendeta Yeremias Zanambani tewas tertembak di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.
- Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, Eden Armando Bebari, dan rekannya, Ronny Wandik, tewas ditembak aparat keamanan di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua.

PENGADUAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA



KASUS DAN KORBAN PEMBUNYIHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA



dengan tuduhan makar pada Juni 2020. Para aktivis ini melakukan aksi menolak rasisme atas masyarakat Papua.

3. Jayapura, Papua

Polisi menangkap anggota Komite Nasional Papua Barat, Assa Osso, pada 23 September 2019. Polisi menuding Assa melakukan makar karena mengunggah video protes antirasisme terhadap warga Papua yang terjadi di Surabaya. Di pengadilan, dakwaan makar tak terbukti.

4. Wamena, Papua

Polisi menangkap mahasiswa Papua, Simon Carlos Magal, pada 1 September 2019. Simon dituding berencana melakukan makar bersama warga Polandia, Jakub Fabian Skrzypski. Simon kini divonis empat tahun penjara dan Skrzypski tujuh tahun penjara.

5. Fakfak, Papua

Polisi menangkap 23 orang dengan tuduhan makar karena akan merayakan deklarasi kemerdekaan Papua Barat, pada 1 Desember 2019. Mereka hingga kini belum dijatuhi vonis pengadilan.

6. Manokwari, Papua Barat

Polisi menangkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kota Sorong, Sayang Mandabayan, di Bandar Udara Manokwari pada 3 September 2019 dengan tuduhan melakukan makar. Polisi juga menangkap tiga orang, yakni Erik Aliknoe, Pende Mirin, dan Yunus Aliknoe, karena mengorganisasi protes antirasisme.

7. Sorong, Papua Barat

Polisi menangkap 15 orang sepanjang September-November 2019. Sebagian adalah aktivis dan petani yang berdemonstrasi antirasisme dan menggunakan kaus Bintang Kejora saat peringatan deklarasi kemerdekaan Papua Barat 1961.

TAHANAN POLITIK PAPUA



Salah satu terdakwa kasus makar bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Desember 2019.

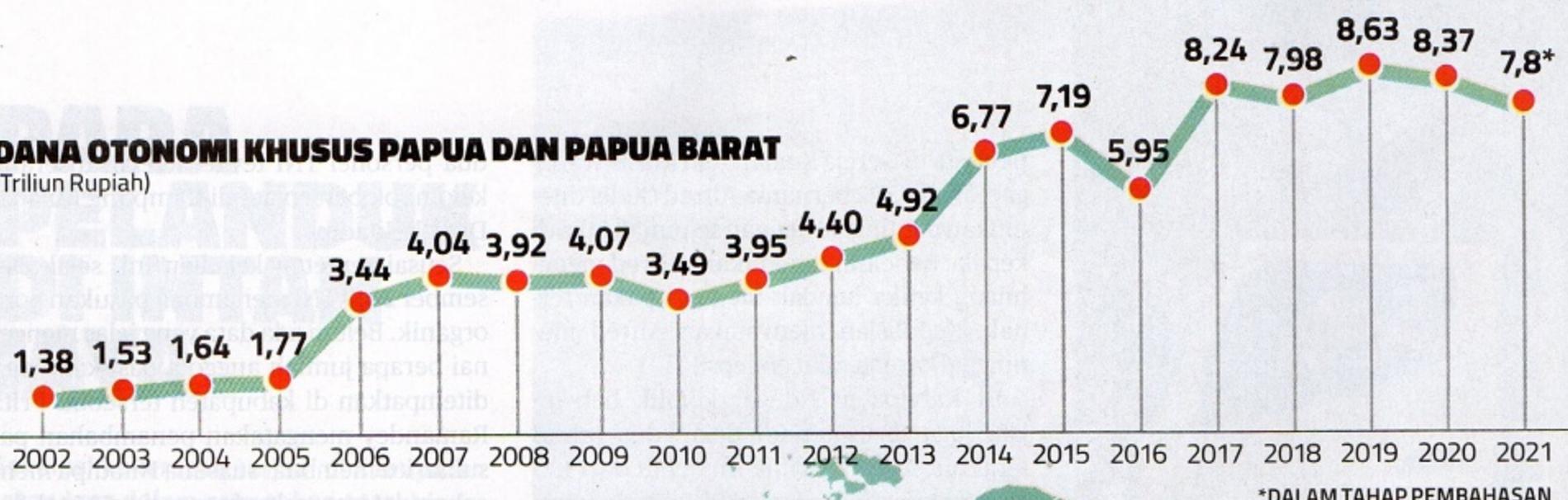
1. Jakarta

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis enam aktivis Papua, termasuk Ketua Asosiasi Mahasiswa Dataran Tinggi Papua Ambrosius Mulait dan Paulus Suryanta Ginting, sembilan bulan penjara atas tuduhan makar pada April 2020. Mereka melakukan aksi damai menuntut referendum Papua di depan Istana Merdeka pada 28 Agustus 2019.

2. Balikpapan, Kalimantan Timur

Pengadilan Negeri Balikpapan memvonis tujuh aktivis Papua, termasuk Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat Agus Kossay, 10-11 bulan penjara

DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT
(Triliun Rupiah)



*DALAM TAHAP PEMBAHASAN

TRILIUNAN RUPIAH DI PAPUA

SATU tahun menjelang berakhirnya masa penerapan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, kondisi politik dan keamanan wilayah paling timur Indonesia itu memanas. Jakarta ingin pemberian dana tambahan itu diperpanjang, sedangkan sebagian kalangan di Papua dan Papua Barat menolak skema dana yang dianggap tak adil. Setelah berjalan hampir 20 tahun, apa yang sudah dicapai dana otonomi khusus di Papua?

AWAL MULA OTONOMI KHUSUS

- ▶ **1998**
 - Presiden B.J. Habibie menghentikan operasi militer di Irian Jaya. Selama Orde Baru, Irian Jaya menjadi daerah operasi militer atas instruksi Presiden Soeharto.
- ▶ **1999**
 - Presiden B.J. Habibie bertemu dengan perwakilan masyarakat Irian Jaya yang disebut sebagai Tim 100. Muncul wacana penyelesaian masalah konflik Irian Jaya dengan cara demokrasi, yakni pemberian otonomi daerah. Tim 100 tetap meminta kemerdekaan.
 - Pemerintah Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
- ▶ **2000**
 - Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pendekatan akomodatif menyetujui permintaan untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua.
 - Gus Dur juga meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah dan mengizinkan

**AKAR
PERSOALAN
DI PAPUA**

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis hasil studi mereka pada 2011 mengenai akar permasalahan di Papua.

1. Masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia.
2. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.
3. Diskriminasi dan rasisme.
4. Kegagalan pembangunan dan otonomi khusus.

- pengibaran bendera Bintang Kejora.
- ▶ **2001**
 - April: Gubernur Papua Jacobus P. Solossa menyerahkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus serta rekomendasi menuju Papua Baru kepada Gus Dur. Isinya berupa keinginan masyarakat Papua untuk mendapatkan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM.
 - November: Presiden Megawati Soekarnoputri meneken Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- ▶ **2003**
 - Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan

- Pelaksanaan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua.
- ▶ **2004**
 - Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Pemekaran Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, provinsi yang diakui hanya Papua dan Papua Barat.
- ▶ **2008**
 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Pemberlakuan otonomi khusus di dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.



Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, di gedung MPR/DPR, Jakarta, Agustus 2003.